

## Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia

Tiara Suci Andina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Sri Indah Nikensari

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Siti Nurjanah

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

### Article Info

*Article history:*

*Received: 19 September 2018;*

*Accepted: 22 January 2019;*

*Published: 30 March 2019.*

*Keywords:*

*Regional inequality, education, health, infrastructure, Williamson index.*

### Abstract

This study aims to see the effect of the level of education, health, and infrastructure development inequality between regions in Indonesia. The method used in this research is panel data regression method with random effects model. This research was conducted in 34 provinces in Indonesia for the same three years, 2017-2019. The variables in this study consisted of the level of education represented by the average length of schooling (X1) and the illiteracy rate (X2), the level of health represented by life expectancy (X3), infrastructure by road density (X4), and regional inequality by the Williamson Index (Y). This data is secondary data obtained through the Badan Pusat Statistik, both by province and Indonesia. The results of this study prove that the variables of illiteracy and life expectancy have an effect on inequality in development, while the variables of average length of schooling and road regularity have no effect on inequality in development between regions. The coefficients on both illiteracy and road density are positive, while life expectancy and mean length of schooling are negative.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel dengan model *randomeffect*. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia sama tiga tahun yakni tahun 2017-2019. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah (X1) dan angka buta huruf (X2), tingkat kesehatan yang diwakili oleh angka harapan hidup (X3), infrastruktur oleh kerapatan jalan (X4), dan Indeks Williamson (Y). Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik baik per provinsi maupun Indonesia. Hasil dari penelitian ini terbukti bahwa variabel angka buta huruf dan angka harapan hidup berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan variabel rata-rata lama sekolah dan kerapatan jalan tidak memberikan pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Koefisien pada angka buta huruf dan kerapatan jalan adalah positif, sedangkan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah adalah negatif.

### How to Cite:

Author. (2019). Article title. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran dan Akuntansi*, 7(2), 101-111. <https://doi.org/10.21009/JPEPA.007.x.x>

\* Corresponding Author.

## PENDAHULUAN

Pembangunan umumnya diartikan sebagai perbaikan infrastruktur ataupun fasilitas publik lainnya. Namun, secara luas dengan adanya pembangunan di sebuah daerah merupakan suatu bentuk usaha untuk memanusiaikan manusia dengan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga negara. Tetapi, kenyataannya di Indonesia pembangunan di setiap wilayah masih saja menjadi masalah yang seperti tiada akhirnya. Permasalahan ketimpangan pembangunan di Indonesia masih menjadi suatu problematika yang masih pemerintah terus coba minimasir dengan berbagai cara.

Pembangunan pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memperbaiki kesejahteraan seluruh warga negara. Menurut Todaro & Smith (2010) pembangunan merupakan proses meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia dengan meningkatkan level orang hidup, harga diri, dan kebebasan. Douglas C. Nourth pada pemikirannya dalam teori neo klasik mengungkapkan bahwa terdapat keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah (Sjafrizal, 2012)

Hipotesa teori neo-klasik dalam Sjafrizal (2012) mengemukakan bahwa pada awalnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di suatu wilayah ketimpangan pembangunan akan terus berlangsung terus menerus sampai mendapat titik puncak. Setelah melewati fase tersebut, pembangunan yang kemudian dilakukan akan secara bertahap akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Dari hipotesa neo klasik mengartikan bahwa, wilayah wilayah berkembang pada umumnya memiliki tingkat ketimpangan pembangunan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah yang maju. Wilayah yang sudah maju telah melewati fase tingginya tingkat ketimpangan. Oleh karena itu ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi di wilayah maju nilainya sudah tidak lagi tinggi.

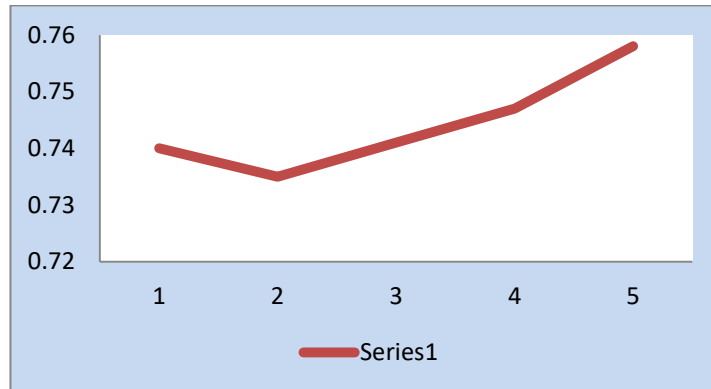
Ketimpangan yang timbul di berbagai wilayah pada akhirnya akan berdampak pada berbagai bidang baik sosial, politik, maupun ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah berdampak pada stabilitas perputaran roda perekonomian di wilayah yang bersangkutan. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada suatu poros menyebabkan daerah lain menjadi tertinggal. Daerah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga keadaan daerah tersebut lebih sejahtera. Sedangkan daerah yang tertinggal, tidak mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga

tingkat kesejahteraannya jauh dibawah daerah sebelumnya (Tambunan, 2001).

Kuncoro (2006) dalam bukunya mengungkapkan bahwa timpangnya kondisi suatu daerah merujuk pada standar hidup hampir dari seluruh penduduk, karena adanya perbedaan disetiap wilayah mulanya disebabkan oleh perbedaan awal dari faktor anugrah (endowment factor). Jika pemerintah terlalu memfokuskan sebuah pembangunan hanya dalam satu wilayah tertentu saja akan menyebabkan sedikit banyak impikasi pada wilayah lain seperti kecemburuan antarwilayah. Oleh karena itu, permasalahan disparitas pembangunan yang terjadi antar daerah menjadi faktor penghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Lessmann (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketimpangan dapat ditanggulangi dengan cara menginvestigasikan berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan di berbagai daerah. Ketimpangan pembangunan merupakan hal alamiah yang terjadi disetiap negara namun jika situasi ini terus memburuk maka kondisi ini akan menyebabkan *domino effect* yang menyebar ke berbagai sektor. Sjafrizal (2012) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) tidak samanya sumber daya alam setiap wilayah, 2) kondisi demografis seperti tenaga kerja, 3) alokasi dana yang bertujuan untuk pembangunan seperti investasi pemerintah maupun asing, 4) terpusatnya kegiatan ekonomi pada suatu wilayah, 5) mobilitas barang dan jasa. Perbedaan faktor-faktor di atas di setiap wilayah menyebabkan proses pembangunan wilayah berbeda sehingga terjadinya ketimpangan secara natural terjadi dan terbentuklah wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal.

Ketimpangan di Indonesia terjadi umumnya di wilayah perdesaan dan perkotaan, pulau Jawa dan luar pulau Jawa, serta kawasan Indonesia bagian timur dan kawasan Indonesia bagian barat (Bappenas, 2016). Adanya ketimpangan pembangunan wilayah di Indoensia terlihat melalui tingginya indeks Williamson sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan antar wilayah. Berikut merupakan grafik ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia selama lima tahun terakhir.



Sumber: BPS

**Gambar 1.1**  
**Indeks Williamson Indonesia**

Dari grafik di atas terlihat bahwa ketimpangan di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung meningkat. Kondisi ini tentu saja memprihantinkan karena selain terus meningkatnya ketimpangan di Indonesia, angka ketimpangan di Indonesia juga menduduki nilai yang tinggi.

Untuk itu, demi tercapainya kesetaraan antar wilayah di Indonesia diperlukannya berbagai upaya untuk mengatasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Aprianoor & Muktiali (2015) mengungkapkan bahwa pembangunan wilayah-wilayah yang tertinggal merupakan suatu proses mengubah satu wilayah dengan cara memanfaatkan berbagai jenis sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Salah satu sumber daya yang harus ditingkatkan adalah sumber daya manusia. Hal itu juga ditemukan dalam buku milik Todaro & Smith (2010) yang menyatakan bahwa indikator yang lebih baik dalam mengukur disparitas pembangunan dengan cara memasukkan variabel pendidikan dan kesehatan tidak hanya dengan tingkat pendapatan.

Pembangunan manusia atau human development di cetuskan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dalam "*Global Human Development Raport*". Dalam pembahasan tersebut UNDP mengungkapkan pembangunan manusia adalah tentang bagaimana memperluas kekayaan kehidupan manusia, tidak dalam segi ekonomi semata (UNDP, 1990). Menurut Badan Pusat Statistik (2019) melakukan pembangunan manusia adalah suatu proses pembangunan dengan tujuan agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Selaras dengan pernyataan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda, Muluk, & Prasetyo (2013) pun menyetujui bahwa adapun kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat pula meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga pembangunan antar wilayah dapat berkurang.

Selain meningkatkan pendidikan dan kesehatan, kemudahan dalam mengakses suatu wilayah juga dapat meminimalisir terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah. Membangun infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah menjadi penting karena tersedianya infrastruktur menjadi penunjang dalam kegiatan bermasyarakat. Tersedianya infrastuktur seperti jalan dengan kondisi yang layak turut mempermudah pergerakan manusia dan barang. Dalam upaya meningkatkan bidang pendidikan dan kesehatan dapat terlaksana apabila infrastruktur yang ada mudah dijangkau atau memiliki aksestabilitas yang tinggi. (Mopangga, 2011).

Infrastruktur dalam perekonomian disebut dengan public capital (modal publik) yang merupakan hasil dari investasi pemerintah dalam bentuk: jembatan, jalan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2001). Dalam kaitannya pada ketimpangan pembangunan World Bank (2016) mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di wilayah tertinggal atau perdesaat dapat memperkecil biaya transportasi barang yang dapat menghubungkan petani ataupun orang yang memiliki usaha di perdesaan dapat ke pasar untuk menjual barang mereka di pasar. Selain itu, masyarakat juga dapat bergerak dengan bebas untuk menjangkau akses pendidikan dan kesehatan. Lancarnya pergerakan masyarakat dikarenakan tingginya aksestabilitas disuatu daerah dapat mempersempit gap pembangunan antar wilayah.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk membahas penelitian tentang “Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia”

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel-variabel yang diteliti dengan mandiri atau tanpa menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini berkisar antara tahun 2017-2019 dengan objek sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh untuk penelitian ini didapatkan di Badan Pusat Statistik. Variabel yang dijadikan objek dalam penelitian ini antara lain Ketimpangan Pembangunan Wilayah menggunakan indeks williamson yang merupakan variabel dependen (Y) dan variabel independennya antara lain rata-rata lama sekolah (X1), angka buta huruf (X2), angka harapan hidup (X3), dan kerapatan jalan (X4).

## HASIL DAN DISKUSI

Estimasi model regresi menggunakan data panel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Setelah melakukan berbagai uji maka memperoleh hasil estimasi menggunakan Random Effect Model sebagai model terbaik untuk penelitian ini.

Dependent Variable: KP

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.567561	1.047474	2.451192	0.0160
RLS	-0.000813	0.010098	-0.080504	0.9360
ABH	0.036001	0.009976	3.608755	0.0005
AHH	-0.031642	0.014980	-2.112289	0.0372
KJ	0.019572	0.031189	0.627526	0.5318
R-squared	0.191408			

Dalam tabel di atas terlihat bahwa hasil regresi untuk model ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai berikut:

$$KP_{it} = 2,567561 - 0,000813RLS + 0,036001ABH - 0,031642AHH + 0,019572KJ$$

Hasil persamaan regresi di atas terlihat bahwa pengaruh rata-rata lama sekolah (X1) memiliki koefisien sebesar -0,000813 memiliki arti yaitu setiap kenaikan 1% variabel rata-rata lama sekolah diprediski akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 0,001452. Variabel kedua yaitu angka buta (X2) huruf memiliki koefisien

sebesar 0,036001 artinya apabila angka buta huruf meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 0,036001. Nilai koefisien regresi variabel X3 yaitu angka harapan hidup bernilai negatif sebesar -0,031642 artinya apabila X2 mengalami kenaikan sebesar 1% maka ketimpangan pembangunan antar wilayah diprediksi akan menurun sebanyak 0,037502. Panjang jalan memiliki koefisien bernilai positif yakni sebesar 0,019572 yang berarti apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1% maka akan mengalami peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah sebesar 0,019572.

### **Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mengukur tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Melalui rata-rata lama sekolah dapat tercermin bagaimana kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Secara teori tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah.

Dalam penelitian ini rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah. Ditandai dengan nilai probabilitas 0,9360 lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 0,05. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Raafi'i, Hakim, & Putri pada tahun 2018 bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aswar (2018) juga mendapatkan hasil yang sama, hal ini dikarenakan adanya peningkatan rata-rata lama sekolah tidak mampu mempengaruhi ketimpangan wilayah.

Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017-2019 di 34 provinsi di Indonesia rata-rata lama sekolah dominan meningkat setiap tahunnya. Namun peningkatan rata-rata lama sekolah memiliki nilai yang sangat sedikit, apabila dirata-ratakan ke 34 provinsi di Indonesia mengalami rata-rata peningkatan hanya sebesar 1% selama 3 tahun terakhir. Dan apabila dilihat secara keseluruhan melalui nilai rata-rata lama sekolah Indonesia pada tahun 2019 sebesar 8.34, hanya meningkat sebesar 2,8% dari tahun 2017 yakni sebesar 8.10 tahun.

### **Angka Buta Huruf**

Angka buta huruf adalah indikator penting untuk melihat sejauh mana suatu wilayah terbuka terhadap pengetahuan. Tingginya tingkat melek huruf menandakan bahwa pendidikan di wilayah tersebut telah

efektif. Dalam penelitian ini angka buta huruf terbukti berpengaruh untuk ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

Terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari alpha yang ditentukan sebesar 0,05. Koefisien bernilai positif sebesar 0.036001 menandakan bahwa peningkatan angka buta huruf berpengaruh menurunkan ketimpangan pembangunan. Hasil temuan ini membuktikan jika semakin besar persentase angka buta huruf yang merupakan representasi dari salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang terdapat dalam satu wilayah akan mengurangi tingkat ketimpangan di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang & Fan (2002) dan Tiwari, dkk (2020) karena pendidikan melalui angka buta huruf mampu menurunkan produktivitas tenaga kerja karena tingkat pendidikan yang tinggi akan memungkinkan seseorang mendapat pendidikan yang lebih layak. Selain itu dengan menurunnya angka buta huruf di sebuah kawasan membuktikan telah tersentuhnya pendidikan di wilayah tersebut. Selain itu, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis maka akan meningkatkan kelayakan kerja dan prospek kerja. Sehingga seiring berjalannya waktu keadaan ini akan mempercepat pertumbuhan daerah.

### **Angka Harapan Hidup**

Variabel angka harapan hidup mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada hasil uji t terhadap variabel angka harapan hidup yang menghasilkan t-hitung yang nilainya lebih besar dari t-tabel sebesar  $-2.112289 > 0.67703$  selain itu juga terlihat oleh nilai probabilitas sebesar 0,0372 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 0,05.

Melalui hasil uji t tersebut membuktikan bahwa variabel angka harapan hidup memiliki hubungan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Konotasi negatif pada nilai t-hitung menandakan bahwa antar variabel memiliki hubungan yang negatif.

Angka harapan hidup merupakan sebuah alat ukur dalam melihat tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah dan juga sebagai indikator umum yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka harapan hidup juga menandakan adanya upaya pemerintah dalam memperbaiki kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Penelitian ini memperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhil (2020) bahwa angka harapan hidup terbukti



berpengaruh terhadap disparitas pembangunan wilayah. Hal ini didasarkan karena angka harapan hidup memcerminkan nilai kesehatan masyarakat khususnya tenaga kerja. Tenaga kerja dengan kesehatan yang baik akan berdampak pada daya produksi ekonomi suatu masyarakat karena kesehatan merupakan gambaran efisiensi kegiatan ekonomi dan sosial.

### **Kerapatan Jalan**

Variabel kerapatan jalan tidak mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Hal ini di dasarkan pada hasil uji t terhadap variabel angka harapan hidup yang menghasilkan t-hitung yang nilainya lebih kecil dari t-tabel sebesar  $0.627526 < 0.67703$  selain itu juga terlihat oleh nilai probabilitas sebesar 0,5318 yang lebih besar dari tingkat signifikansi alpha 0,05. Melalui hasil uji t tersebut membuktikan bahwa variabel kerapatan jalan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Hasil yang sama juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aswar (2018) bahwa rasio panjang jalan memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan hal ini dikarenakan terlalu sedikitnya peningkatan panjang jalan diwilayah yang diteliti. Hal ini dikarenakan rendahnya pengeluaran pemerintah pada bidang tersebut. Hasil ini juga disetujui oleh Bajar & Rajeev (2015) karena tersedianya jalan di daerah tersebut dengan kualitas yang cukup buruk sehingga tidak memberikan dampak pada peningkatan akses dan produktifitas yang dapat mengurangi ketimpangan di wilayah tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil analisis mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil dari variabel ini memberikan koefisien yang negatif.
2. Angka buta huruf berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
3. Angka harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

4. Kepadatan jalan memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.

### **Saran**

1. Pemerintah perlu lebih meningkatkan angka rata-rata lama sekolah agar dapat sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah.
2. Pemerintah perlu mengadakan program-program yang dapat memberantas buta huruf disuatu wilayah dapat membuat masyarakat lebih terbuka terhadap ilmu pengetahuan sehingga kecilnya persentase buta huruf dapat mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia.
3. Pemerintah hendaknya mendorong usaha untuk meningkatkan angka harapan hidup setiap daerahnya seperti meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka kematian bayi, dan meningkatkan fasilitas umum agar upaya memperkecil kesenjangan pembangunan dapat terlaksana.
4. pemerintah perlu memperhatikan kriteria yang tepat dalam merencanakan pembangunan sehingga pembangunan jalan tepat sasaran. Selain itu, hendaknya pemerintah memprioritaskan perbaikanjalan dengan kondisi yang rusak dan rusak berat sehingga jalan yang telah tersedia dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

### **REFERENSI**

- Aprianoor, P., & Mukhtali, M. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*, 4(4), 484–498.
- Aswar. (2018). Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2002-2016. Retrieved from [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/ZTUxNThjOTc1NTdmNjI4MDAwM2NmMWVhZjQ3ZGQ1MzBiNTE3ODU5NQ==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTUxNThjOTc1NTdmNjI4MDAwM2NmMWVhZjQ3ZGQ1MzBiNTE3ODU5NQ==.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2019). Indeks Pembangunan Manusia.
- Bajar, S., & Rajeev, M. (2015). *The Impact of Infrastructure Provisioning on Inequality : Evidence from India*.
- BAPPENAS. (2016). *BAB 26 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah*.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Lessmann, C. (2012). REGIONAL INEQUALITY AND DECENTRALIZATION – AN EMPIRICAL ANALYSIS. *Environment and Planning A*, 44(6), 1363–1388.
- Mankiw, N. G. (2001). *Principles Of Economics*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo Herwin Mopangga SEKOLAH PASCASARJANA. *Trikonomika*, 10(1), 40–51.
- Nurhuda, R., Muluk, K. M. ., & Prasetyo, W. Y. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 110–119.
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(3), 244. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.3.244-257>
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tambunan, T. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tiwari, C., Bhattacharjee, S., & Chakrabarti, D. (2020). Investigating Regional Inequalities in India: Are Indian Districts Converging? *Journal of International Development*, 32(5), 684–716. <https://doi.org/10.1002/jid.3472>
- Todaro, M.P, & Smith, S. . (2010). *Economic Development Eleventh Edition*.
- Todaro, Michael P, & Smith, S. C. (2010). *Economic Development - 11th Edition*. New York: Pearson.
- United Nations Development Programme. (1990). Human Development Reports. In *United Nations Development Programme*. Retrieved from [http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi#:~:text=The Human Development Index \(HDI,each of the three dimensions](http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi#:~:text=The Human Development Index (HDI,each of the three dimensions).
- Zhang, X., & Fan, S. (2002). Infrastructure, Openness, and Regional Inequality In India. *Research in Agricultural & Applied Economics*, 1–18.